



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004 – 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian nomenklatur dari bidang kewenangan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

DAN

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004 – 2009

Pasal I

Matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) diubah dengan matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 5**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 – 2009**

I. UMUM

bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian nomenklatur dari bidang kewenangan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 20**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2004 – 2009
(Telah disesuaikan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006)

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maju, sejahtera, Mandiri dan Demokratis

MISI 1 :

Memfasilitasi proses peningkatan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan, keamanan dan ketertiban, dan penanggulangan masalah sosial

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
1.1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1.1.1 Meningkatkan sarana prasarana kehidupan beragama	Peresentase peningkatan jumlah bantuan untuk tempat tinggal	%	2	2	2	2	2	Meningkatkan jumlah bantuan tempat tinggal	Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama (1.13.XX.21)	Bidang sosial (1.13)
	1.1.2 Meningkatkan pelayanan keagamaan	Terlaksananya MTQ sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	Meningkatkan jumlah pelayanan keagamaan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan keagamaan (1.13.XX.21)	Bidang sosial (1.13)
		Peresentase jumlah Ponpes/MDA/MDW/MDU yang diberi bantuan	%	100	100	100	100	100			
1.1.3 Meningkatkan kerukunan umat beragama	Peresentase terlaksananya forum komunikasi antar umat beragama	%	100	100	100	100	100	Meningkatkan bantuan untuk pembinaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kehidupan beragama (1.13.XX.21)	Bidang sosial (1.13)	
1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1.2.1 Meningkatkan penanganan penyandang masalah sosial masyarakat dan penanggulangan masalah sosial	Persentase penurunan kasus masalah sosial masyarakat	%	10	10	10	10	10	Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial dan penanggulangan masalah sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (1.13.XX.16)	Bidang sosial (1.13)
	1.2.2 Meningkatkan sarana prasarana untuk kegiatan sosial masyarakat	Persentase Panti-panti Sosial yang diberi bantuan	%	100	100	100	100	100	Meningkatkan bantuan untuk pelayanan sosial	Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. (1.13.XX.15)	Bidang sosial (1.22)
	1.2.3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM Lembaga Kemasyarakatan, meliputi Kader PKK – P2WKSS, Kder Pokjantal Posyandu, dan Kader Pembangunan Masyarakat	%	3	3	3	3	3	Meningkatkan pelatihan bagi SDM Lembaga Masyarakat Desa	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (1.22.XX.15)	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (1.22)
	1.2.4 Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri	Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat, meliputi Sarpras desa Kader PPA, Sarana Promosi UED-SP (Desa dan Kelurahan) dan TTG	%	4	4	4	4	4	Membina usaha ekonomi masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (1.22.XX.16)	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (1.22)
	1.2.5 Tercapainya Desa / Kelurahan swasembada	Meningkatkan fasilitas lingkungan pedesaan meliputi sarana tempat tinggal dan lingkungan sehat, air bersih, kader UPS-KPS dan jalan aspal desa, serta teridentifikasinya faktor pendukung	%	5	5	5	5	5	Pengembangan sumber daya pedesaan	Pengembangan Perumahan (1.04.XX.15)	Perumahan rakyat (1.04)

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
1.3 Meningkatnya kesejahteraan dan keadilan jender	1.3.1 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan anggaran penanganan program pemberdayaan perempuan	%	25	25	25	50	50	Meningkatkan peranan dan kedudukan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (1.11,XX.17)	Bidang pemberdayaan perempuan (1.11)
1.4 Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1.4.1 Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)	Persentase penurunan Tingkat Kriminallitas terhadap rencana	%	100	100	100	100	100	Penegakan hukum	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (1.19.XX.16)	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (1.19)
		Persentase pelaksanaan Pelatihan kamtibmas	%	100	100	100	100	100			
		Persentase penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan rencana	%	100	100	100	100	100			

MISI 2 :

Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas.

TUJUAN	SASARAN							KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)	
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008				2009
2.1 Meningkatkan mutu dan relevansi	2.1.1 Meningkatkan mutu tenaga kependidikan di semua tingkat dan jenjang pendidikan	Jumlah guru SD/MI berkualitas min. D2	%	90	95	100	100	100	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek pendidikan balik teknis maupun non teknis	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1.01.XX.20)	Bidang pendidikan (1.01)
		Jumlah guru SLPT/MTs berkualitas minimal D3	%	80	85	90	95	100			
		Jumlah guru SMU/SMK/MA berkualitas minimal S1	%	80	85	90	95	100			
		Peningkatan profesionalisme guru	%	10	11	12	13	14			
		Peningkatan kesejahteraan guru	%	10	15	20	25	30			
		Peningkatan kemampuan akademik siswa pada lomba mata pelajaran maupun olimpiade		Tk.Prop	Tk.Prop	Tk.Prop	Tk.Prop	Tk.Prop			
		Bea siswa bagi siswa berprestasi	%	10	10	10	10	10			
		Pengembangan kelas imersi	%	5	10	15	20	25			
	2.1.2 Meningkatnya jumlah dan mutu sarana prasarana pendidikan	Peningkatan jumlah sekolah yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi	%	20	30	40	50	80	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (1.01.XX.16) Program pendidikan Menengah (1.01.XX.17) Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan (1.01.XX.21)	Bidang pendidikan (I.01)
Alat-alat dan buku-buku pelajaran		%	40	50	80	70	80				
Sarana perpustakaan sekolah		%	20	30	40	50	60				
2.1.3 Meningkatnya mutu manajemen pendidikan	Komite sekolah di setiap jejang pendidikan	%	100					Melakukan penyadaran peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan (1.01.XX.22)	Bidang pendidikan (1.01)	
	Partisipasi masyarakat	%	40	50	60	70	80				
	Jumlah sekolah yang terakreditasi	%	40	50	60	70	80				
2.1.4 Meningkatnya jenis dan kualitas seni budaya	Peningkatan sarana prasarana kesenian	%	40	50	60	70	80	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pengembangan Nilai Budaya (1.17.XX.16) Pengelolaan Kekayaan Budaya	Bidang kebudayaan (1.17)	
	Pengembangan jenis kesenian	%	40	50	60	70	80				
	Tetap lestari peninggalan sejarah dan nilai-nilai budaya	%	40	50	60	70	80				
2.2 Meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan	2.2.1 Meningkatnya daya tampung pendidikan	Daya tampung :						Meningkatkan daya tampung sekolah	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (1.01.XX.16) Program pendidikan Menengah (1.01.XX.17)	Bidang pendidikan (1.01)	
		- SD/MI	%	80	85	90	95				100
		- SMP/MTs	%	80	85	90	95				100
		- SMA/SMK/MA	%	80	85	90	95				100

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
2.2.2 Meningkatnya APK / APM dan AT serta menurunnya angka DO.	Angka Partisipasi Kasar (APK)								Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek pendidikan baik teknik maupun non teknis	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (1.01.XX.16) Program pendidikan Menengah (1.01.XX.17)	Bidang Pendidikan (1.01)
	- SD/MI	%	107,97	108,17	108,37	108,57	108,77				
	- SMP/MTs	%	58,79	58,95	57,11	57,27	57,43				
	- SMA/SMK/MA	%	19,32	19,41	19,5	19,59	19,68				
	Angka Partisipasi Murni (APM)										
	- SD/MI	%	95,36	95,54	95,72	95,90	96,08				
	- SMP/MTs	%	50,67	50,76	62,42	84,45	69,02				
	- SMA/SMK/MA	%	15,04	15,07	15,1	15,13	15,18				
	Angka Transisi (AT)										
	- SMP/MTs	%	67,64	69,14	70,64	72,14	73,64				
	- SMA/SMK/MA	%	30,3	31,2	32,1	33					
	Angka Drop Out (Do)										
	- SD/MI	%	1,5	1,48	1,48	1,44	1,42				
	- SMP/MTs	%	2,05	2,02	1,99	1,96	1,93				
	- SMA/SMK/MA	%	1,21	1,2	1,19	1,18	1,17				
	Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Wajar Diknas	%	80	90	100	100	100				
	2.2.3 Meningkatnya fasilitasi Kejar Paket A, B, dan C serta pembinaan pemuda dan olah raga	Kejar Paket A, B, dan C	%	80	85	90	95	100	Pembinaan dan pengawasan pendidikan luar sekolah dan pemuda dan olah raga	Pendidikan non Formal (1.01.XX.18) Pendidikan Luar Biasa (1.01.XX.19) Pembinaan dan pemyarakatan Olah Raga (1.18.XX.20)	Pendidikan (1.01) Bidang pemuda dan olahraga (1.18)
		Sarana prasarana Kejar Paket	%	100	100	100	100	100			
		Pengembangan sekolah terpadu	%	30	40	50	60	70			
		Rintisan Community College	%	5	10	15	20	25			
Penyelenggaraan SLTP Terbuka		%	100	100	100	100	100				
Pengembangan SKB		%	30	40	50	60	70				
Peningkatan prestasi olah raga			Tk. Prop								

MISI 3 :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan membudayakan PHBS

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
3.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.1 Terwujudnya status gizi baik di masyarakat	Balita Gizi Kurang	%	15	14	13	12	11	Peningkatan status gizi keluarga sadar gizi dan cakupan program gizi	Perbaikan Gizi Masyarakat (1.02.XX.20)	Bidang Kesehatan (.02)
		Ballita Gizi Buruk yang ditangani	%	100	100	100	100	100			
		Total Goiter Rate-Gangguan Akibat Kurang Iodium	%	15.6	12.6	12.6	9.60	8.60			
		Anemia Ibu Hamil	%	47.5	45	43	41	39			
		Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah	%	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20			
		Kecamatan Bebas Rawan Gizi	%	50	58	56	74	80			
	3.1.2 Terwujudnya kesehatan Warga Usia Lanjut dan Bermanfaat	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	%	50	55	60	65	70	Pembinaan kesehatan warga usia lanjut	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (1.02.XX.30)	Bidang Kesehatan (1.02)
		Cakupan Posyandu Warga Usia Lanjut Aktif	%	60	65	70	75	80			
	3.1.3 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau masyarakat.	Cakupan Pelayanan Puskesmas	%	15	15	15	15	15	Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (1.02.XX.15) Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.XX.16) Pengawasan Obat dan Makanan (1.02.XX.17) Pengembangan Obat Asli Indonesia (1.02.XX.18) Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin (1.03.XX.24) Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya (1.02.XX.25) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (1.02.XX.31)	Bidang Kesehatan (1.02)
		Cakupan pengadaan dan pengelolaan Obat	%	80	82.5	85	87.5	90			
		Cakupan Pembinaan RS, Bp dan RB	%	60	65	70	75	80			

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
3.1.4 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan.	Cakupan TTU Sehat	%	40	45	50	60	70	Upaya pemantauan, pengawasan dan perbaikan kualitas lingkungan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari penyakit berbasis lingkungan	Pengembangan Lingkungan Sehat (1.02.XX.21)	Bidang Kesehatan (1.02)	
	Cakupan TPMM Sehat	%	30	40	50	60	70				
	Cakupan SAB Sehat	%	55	60	60	65	70				
	Cakupan Perumahan Sehat	%	50	55	60	65	70				
	Cakupan Puskesmas dengan pelayanan klinik Sanitasi	%	70	77.8	85	92.5	100				
3.1.5 Terwujudnya kesehatan ibu dan anak	Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup		27	24	21	18	15	Upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak (1.02.XX.32) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (1.02.XX.29)	Bidang Kesehatan (1.02)	
	Kematian ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		140	133	130	127	125				
	Jumlah Polindes berkembang jadi Poliklinik Kesehatan Desa		36	72	108	144	180				
3.1.6 Meningkatnya kualitas perilaku sehat masyarakat	Cakupan PHBS Strata Pariipurna	%	25	35	45	55	65	Upaya pembudayaan PHBS, pengembangan JPKM dan pembinaan UKI dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektoral	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (1.02.XX.19)	Bidang Kesehatan (1.02)	
	Cakupan kepesertaan JPKM Pra bayar	%	40	50	60	70	80				
	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa	%	100	100	100	100	100				
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	%	20	30	40	60	80				
3.1.7 Meningkatnya perlindungan masyarakat dari penyakit menular dan menurunnya angka penyakit menular	Angka kesembuhan penderita paru TBC BTA positif		>85	>85	>85	>85	>85	Intensifikasi kegiatan imunisasi, pengamatan penyakit dan pemberantasan penyakit menular dilaksanakan oleh Pemerintah dengan peran aktif masyarakat	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular (1.02.XX.22)	Bidang Kesehatan (1.02)	
	Angka kesakitan kusta per 10.000 penduduk		1.7	1.5	1.2	0.9	0.9				
	Angka kesakitan DBD		3/10.000	3/10.000	2.5/10.000	2.5/10.000	2/10.000				
	Angka kesakitan malaria		0.5/1000	0.4/1000	0.3/1000	0.2/1000	0.2/1000				
	Angka AFP pada penduduk <15 Th		1/100000	1/100000	1/100000	1/100000	1/100000				
	Cakupan imunisasi dasar	%	91	92	93	94	95				

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
	3.1.8 Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan	Cakupan SDM Tenaga Kesehatan	%	25	40	55	65	75	Pendidikan dan latihan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (1.02.XX.28)	Bidang Kesehatan (1.02)
	3.1.9 Terwujudnya Sistem Manajemen Kesehatan di semua jenjang administrasi pelayanan kesehatan	Cakupan Protap Upaya Kesehatan	%	35	55	65	75	90	SMK dikembangkan di berbagai tingkat administrasi kesehatan	Standarisasi pelayanan Kesehatan (1.02.XX.23)	Bidang Kesehatan (1.02)
		Cakupan Sistem Informasi Kesehatan	%	35	55	65	75	90			
	3.1.10 meningkatnya kualitas layanan, kepercayaan/kepuasan pelayanan dan produktivitas personel di Rumah Sakit	Pencapaian Standar dalam Akreditasi RS	%	60	60	65	70	75	Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. (1.02.XX.26) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahs akit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. (1.02.XX.27)	Bidang Kesehatan (1.02)
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	%	60	64	65	65	65			
		Bed Dccupancy Ratio	%	60-85	60	85	60	85			
		Terpenuhinya sertifikat keahlian sesuai standar	%	80	82	83	84	85			
		Entri data berbasis IT	%	6	10	10	12	24			
		Ratio Pendapatan rata-rata per layanan RS	%	9.8	10	11.5	12	12			
		Cost Recovery RS	%	0.56	0.6	0.7	0.8	0.95			

MISI 4 :

Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam peningkatan daya saing di bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)				
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET								
				2005	2006				2007	2008	2009	
4.1 Meningkatnya diversifikasi, intensifikasi, dan produktivitas di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, serta Perikanan dan Kelautan	4.1.1 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan	a. Meningkatnya Produktivitas Pertanian :	Kw/Ha	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	Melaksanakan pola intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pertanian tanaman pangan	Peningkatan ketahanan pangan (2.01.XX.16)	Bidang Pertanian (2.01)	
		- Padi	Kw/Ha	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0				
		- Jagung	Kw/Ha	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0				
		- Kedelai	Kw/Ha	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0				
		- Kacang Tanah	Kw/Ha	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0				
		- Ubi Kayu										
		b. Meningkatnya Produksi Pertanian	Ton	296.600	297.330	297.860	298.390	298.920				
		- Padi	Ton	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000				
		- Jagung	Ton	150	150	150	150	150				
		- Kedelai	Ton	650	675	680	685	690				
	- Kacang Tanah	Ton	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500					
	- Ubi Kayu											
	c. Meningkatnya intensitas tanam melalui PAT irigasi pompa	Jenis	2	2	2	2	2					
	4.1.2 Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan	a. Meningkatnya Produktifitas Perkebunan :	Ton/Ha	5.30	5.50	5.70	5.80	6.00	Melaksanakan pola intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perkebunan	Peningkatan ketahanan pangan (2.01.XX.16)	Bidang Pertanian (2.01)	
			- Tebu	Ton/Ha	3.00	3.43	3.78	4.10				4.50
			- Melati	Ton/Ha	0.20	0.36	0.44	0.51				0.68
			- Lada	Ton/Ha	0.25	0.27	0.35	0.50				0.75
- Panili			Ton/Ha	0.42	0.57	0.73	0.76	0.89				
- Kopi Arabika			Ton/Ha	4.66	4.86	5.00	5.22	5.41				
- Teh			Ton/Ha	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45				
- Kelapa			Ton/Ha	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48				
- Kapuk Randu			Ton/Ha	0.22	0.23	0.24	0.25	0.27				
- Cengkeh			Ton/Ha	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
- Tanaman Obat												
b. Meningkatnya Produksi Perkebunan		ton	22.790.00	23.650.00	24.510.00	24.940.00	25.800.00					
- Tebu		ton	726.0	834.48	929.88	1.016.80	1.25.00					
- Melati		ton	0.80	2.16	3.52	5.10	8.16					
- Lada		ton	32.25	36.18	34.75	72.00	112.50					
- Panili		ton	54.18	76.38	101.47	109.44	135.50					
- Kopi Arabika		ton	1.151.02	1.210.14	1.255.00	1.320.66	1.379.55					
- Teh	ton	1.542.83	1.558.41	1.650.77	1.705.88	1.761.75						
- Kelapa	ton	585.15	599.25	613.35	640.80	655.20						
- Kapuk Randu	ton	202.62	215.51	228.72	242.25	265.95						
- Cengkeh	ton	70.00	90.00	110.00	130.00	150.00						
- Tanaman Obat												

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
4.1.9 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian	Berfungsinya prasarana pertanian meliputi jaringan irigasi, sumur pantek di Balai Benih Hortikultural, kantor KTNA	Paket	3	2	2	2	2	Peningkatan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (2.01.XX.19)	Bidang Pertanian (2.01)	
	Berfungsinya Alsintan meliputi traktor, pompa air, alat angkut, reapper, thresher, dryer, pulper, pengolah bubuk, perajang simplisia, pengupas lada, dan penggoreng tea tradisional serta alat pengendali hama	Jenis	7	6	6	6	6				
	Terwujudnya sub terminal agribisnis sebagai usaha pemasaran hasil pertanian	Paket	1	1	1	1	-				
	Berfungsinya laboratorium agensia hayati bio insektisida	Unit	1	0	0	0	0				
	Berfungsinya internet di BPP	Unit	9	1	0	0	0				
4.1.10 Meningkatnya kualitas SDM pertanian	Meningkatnya jenis pelatihan ketrampilan bagi SDM Pertanian meliputi, petani, petugas dan penyuluh pertanian	Paket	18	18	18	18	18	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani (2.01.XX.15)	Bidang Pertanian (2.01)	
4.1.11 Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik pertanian, perkebunan dan	Tersajinya berbagai jenis informasi pertanian	Jenis	10	10	10	10	10	Penyebarluasan informasi pertanian	Peningkatan Kesejahteraan Petani (2.01.XX.15)	Bidang Pertanian (2.01)	
4.1.12 Teratasinya serangan Oragnisasi Pengganggu Tanaman (OPT)	Berfungsinya regu pengendali hama dan menurunnya intensitas serangan hama	Klpk	7	14	21	28	35	Pengendalian hama tanaman	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (2.01.XX.18)	Bidang Pertanian (2.01)	

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
4.1.13 Meningkatnya populasi dan produktifitas ternak	Penambahan bibit ternak	Ekor	595	612	573	701	765	Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan (2.01.XX.22)	Bidang Pertanian (2.01)	
	- Hasil Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	8	8	29	33	48				
	- Hasil penataan Taman ternak	Ekor	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850				
	- Tercapainya ternak yang sembuh	Ekor	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850				
	Populasi	Ekor	12.458	12.566	12.585	12.823	12.973				
	- Ternak besar	Ekor	172.312	136.384	201.943	219.147	238.173				
	- Ternak kecil	Ekor	6.289.712	6.364.600	6.442.821	6.524.637	6.610.333				
	- Unggas	Ekor	6.289.712	6.364.600	6.442.821	6.524.637	6.610.333				
	Produksi Hasil Ternak	Kg	7.316.949	7.528.203	7.758.504	8.010.065	8.284.698				
	- Ternak besar	Kg	4.878.894	5.146.865	5.435.653	5.747.048	6.082.996				
- Ternak kecil	Liter	583.193	643.819	710.782	784.749	866.458					
- Unggas	Liter	583.193	643.819	710.782	784.749	866.458					
4.1.14 Meningkatnya kualitas SDM Peternakan	Meningkatnya kemampuan peternak untuk melaksanakan inseminasi buatan	Orang	480	480	480	480	480	Pengembangan SDM Peternakan	Pengembangan Agribisnis (PA) (2.01.XX.24)	Bidang Pertanian (2.01)	
	Meningkatnya kemampuan peternak dalam mengembangkan usaha	Orang	270	270	270	270	270				
	Berkembangnya kelompok Tani Ternak (KTT) yang dinamis	Klp	5	5	5	5	5				
4.1.15 Tercukupinya kebutuhan pakan ternak	Tersedianya kebutuhan pakan ternak	Jenis	2	2	2	2	2	Pendayagunaan sumber daya alam pendukung peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan (2.01.XX.22)	Bidang Pertanian (2.01)	

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
	4.1.16 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana peternakan	Berfungsinya sarana dan prasarana peternakan di RPH, PosKesWan dan Lab. Kesmavet	Paket	6	7	7	7	7	Peningkatan pelayanan yang berkualitas	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (2.01.XX.23)	Bidang Pertanian (2.01)
	4.1.17 Tercapainya PAD Sub Sektor Peternakan	Tercapainya Realisasi Restribusi RPH dan Tambangan Ternak terhadap Target	%	100	100	100	100	100	Peningkatan pelayanan yang berkualitas	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (2.01.XX.23)	
	4.1.18 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Hasil tangkapan ikan di perairan umum waduk cacaban Hasil tangkapan ikan di laut Hasil tambak meningkat – Produksi udang windu – Produksi udang galah – Produksi udang air tawar Produksi benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI)	Ekor	22.000	25.000	26.000	27.000	27.500	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	Pengembangan budidaya perikanan (2.05.XX.20)	Bidang Kelautan dan Perikanan (2.05)
			Kg	858.908	858.806	1.137.218	1.307.800	1.503.970			
			Kg	-	7.200	14.420	21.600	28.800			
			Kg	-	-	1.285	2.570	3.855			
	Kg	5.040	7.440	9.840	12.240	14.640					
Kg	24.000	36.000	60.000	65.000	70.000						
4.1.19 Meningkatnya kualitas sarana prasarana perikanan dan kelautan	Berfungsinya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan Tersedianya habitat buatan (Terumbu Karang) bagi ikan	Jenis	9	10	10	10	10	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan	Pengembangan perikanan tangkap (2.05.XX.21)	Bidang Kelautan dan Perikanan (2.05)	
		Paket	1	1	1	1	1				
4.1.20 Meningkatnya kualitas SDM di bidang perikanan dan kelautan	Pelatihan untuk aparatur dan petani	Paket	1	1	1	1	1	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan (2.05.XX.22)	Bidang Kelautan dan Perikanan (2.05)	
4.1.21 Meningkatnya kualitas lingkungan pantai pesisir	Terbentuknya fungsi ekologi pantai melalui penghijauan pantai Pembangunan growin Pembangunan pemecah gelombang	Paket	1	1	1	1	1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (2.02.XX.24)	Bidang Kelautan dan Perikanan (2.05)	
		Paket	1	1	1	1	1				
		Paket	1	1	1	1	1				
4.2 Terwujudnya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan	4.2.1 Terwujudnya kawasan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan	Jenis	5	5	5	5	5	Pengelolaan DAS	Pemanfaatan Potensi Sumber daya hutan (2.02.XX.15)	Bidang Kehutanan (2.02)
		Berfungsinya lembaga masyarakat desa hutan dan dam perairan	Klpk	3	3	3	3	3			
	4.2.2 Tertanamnya lahan kritis dengan tanaman perkebunan	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan di lahan kritis	Ha	40	80	120	120	120	Pengendalian lahan kritis	Rehabilitasi hutan dan lahan Pemanfaatan kawasan hutan industri (2.05.XX.16)	Bidang kehutanan (2.02)
			Ha	80	80	80	80	80			
4.2.3 Terpeliharanya sumber mata air	Terlaksananya konservasi lahan di sekitar sumber mata air Terlaksananya pemeliharaan tanaman di sekitar sumber mata air Berfungsinya sumur resapan	Ha	80	80	80	80	80	Pemeliharaan sumber mata air	Rehabilitasi hutan dan lahan (2.05.XX.16)	Bidang Kehutanan (2.02)	
		Ha	90	170	230	240	240				
		Unit	10	10	10	10	10				

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
	4.2.4 Terwujudnya tertib penebangan hutan	Terlaksananya penebangan hutan sesuai ketertiban yang berlaku	Paket	1	1	1	1	1	Peningkatan pengelolaan di bidang kehutanan	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (2.02.XX.17) Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (2.02.XX.19) Perencanaan dan pengembangan hutan (2.02.XX.20)	Bidang Kehutanan (2.02)
4.3 Meningkatnya kualitas dan pengembangan usaha IKM / IRT	4.3.1 Meningkatnya kemampuan inovatif pada sentra industri kecil	Berkembangnya sentra industri kecil tradisional produk unggulan yang memiliki kemampuan inovatif	Unit	3	6	12	15	19	Peningkatan sistem dan pola pembinaan	Pengembangan industri Kecil dan Menengah (2.07.XX.16)	Bidang perindustrian (2.07)
	4.3.2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha IKM	Tercapainya peningkatan usaha pada fase industri manajemen modern	Unit	8	17	20	22	30	Transformasi dan networking (kerjasama) melalui teknologi Informasi	Pengembangan sentra-sentra industri potensial (2.07.XX.19)	Bidang perindustrian (0.07)
	4.3.3 Meningkatnya kemampuan kelompok industri pendukung (supporting industry)	Berkembangnya IKM yang mampu memproduksi komponen industri manufaktur	Unit	5	8	13	19	21	Pemanfaatan / pengembangan hasil penelitian dan pengembangan unggulan nasional pada kekkuatan potensi IKM Daerah	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem produksi (2.07.XX.15)	Bidang perindustrian (2.07)
	4.3.4 Meningkatnya perlindungan usaha bagi IKM	Berkembangnya IKM yang menerapkan : - GKM (Gugus Kendali Mutu) - ISO 9000 – 2000 Berkembangnya jenis produk yang bersertifikat SNI (Standar Nasional Industri)	Unit Unit Jenis	7 5 3	9 5 7	11 5 13	12 5 19	16 5 34	Pengembangan usaha dengan penerapan GKM, ISO, dan SNI	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2.07.XX.17)	Bidang perindustrian (2.07)
4.4 Terwujudnya pengakuan atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	4.4.1 Meningkatnya perlindungan usaha bagi IKM	Berkembangnya jenis produk IKM yang telah bersertifikat HAKI : - Hak Cipta - Hak Merek - Hak Paten - Hak Desain	Jenis Jenis Jenis Jenis	1 15 1 1	1 15 1 1	1 15 1 1	1 15 1 2	1 18 1 2	Peningkatan layanan dan pendampingan / fasilitas HAKI	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2.07.XX.17)	Bidang perindustrian (2.07)
4.5 Meningkatnya kemampuan dan perluasan pemasaran produk-produk daerah baik di dalam maupun di luar negeri	4.5.1 Meningkatnya jumlah eksportir produk-produk hasil industri	Jumlah produsen bertambah	Orang			1	1	1	Pengembangan ekspor non migas	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (2.06.XX.17)	Bidang perdagangan (2.06)
	4.5.2 Meningkatnya jalinan kemitraan usaha dan promosi perdagangan	Jumlah pengusaha komoditas potensi ekspor yang menjalin kemitraan usaha	Orang	3	3	3	3	3	Perluasan pasar	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.XX.18)	Bidang perdagangan (2.06)
		Temu usaha antara eksportir dengan produsen komoditas ekspor	Klp	1	1	1	1	1			
	Pameran produk ekspor : - Jenis promosi produk unggulan Misi dagang antar daerah	Jenis Klp	3 0	3 1	3 0	3 1	3 0				

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
4.5.3 Meningkatnya penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan informasi pasar	Penataan sample produk di show room Kelompok Usaha Bersama (KUB) PKL yang terbentuk Informasi pasar tentang perkembangan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat Informasi realisasi ekspor non migas	Jenis	10	10	10	10	10	Pengembangan sistem informasi pasar dan kelembagaan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.XX.18)	Bidang perdagangan (2.06)	
		Klp	20	20	20	20	20				
		Lap	12	12	12	12	12				
		Lap	12	12	12	12	12				
4.5.4 Meningkatnya tertib niaga dan perlindungan konsumen	Peningkatan jumlah produsen, pedagang. Konsumen yang memahami UU No. 18 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen melalui sosialisasi Pemantauan dan pengawasan barang yang beredar di pasaran Peningkatan jumlah pengusaha yang memiliki SIUP	Orang	200	200	200	200	200	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan sektor perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2.06.XX.15)	Bidang perdagangan (2.06)	
		Pasar	10	10	10	10	10				
		Pengsh	300	300	300	300	300				
4.5.5 Meningkatnya kemampuan pengusaha kecil dan menengah	Jumlah PKM yang didiklat manajemen usaha pemasaran dan keuangan Jumlah PKM yang mendapat bantuan permodalan Jumlah PKM yang trampil	Pengsh	0	30	20	20	30	Pembinaan dan pengembangan PKM	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.XX.18)	Bidang perdagangan (2.06)	
		Pengsh	50	50	50	50	50				
		Pengsh	200	200	200	200	200				
4.6 Meningkatnya kontribusi Sektor Pariwisata	4.6.1 Meningkatnya obyek dan daya tarik wisata	Berkembangnya Obyek Wisata (OW) dan daya tarik wisata						Mengembangkan sarana dan prasarana Obyek Wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata (2.04.XX.16)	Bidang pariwisata (2.04)	
		Purwahamba Indah									
		- Pembebasan Tanah	Paket	1	0	0	1				0
		- Sarana Prasarana	Paket	1	1	1	1				1
		Guci									
		- Sarana Prasarana	Paket	1	1	1	1				1
		Waduk Cacaban									
- Sarana Prasarana	Paket	1	1	1	1	1					
Gua Lawet, Balapulung											
- Kawasan OW baru	Paket	1	0	1	1	1					
Tourist Information Center	Paket	0	1	0	0	0					
4.6.2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata - Guci - Cacaban - Purwahamba Indah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata - Guci							Meningkatkan frekuensi promosi melalui berbagai media	Pengembangan Pemasaran Pariwisata (2.04.XX.15)	Bidang pariwisata (2.04)	
		%	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				
		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
		%	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				
		%	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				

		- Cacaban - Purawahamba Indah	% %	0.50 1.80	0.50 1.80	0.50 1.80	0.50 1.80	0.50 1.80			
	4.6.3 Meningkatkan daya dukung potensi wisata	Meningkatnya dukungan pengembangan pariwisata meliputi pelayanan perijinan dan pelayanan trayek khusus ke OW dan event pariwisata	Paket	3	2	2	2	2	Meningkatkan pelayanan di bidang perijinan, transportasi dan meningkatkan frekuensi hiburan	Pengembangan Kemitraan (2.04.XX.17)	Bidang pariwisata 2.04
	4.6.4 Meningkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan	Aparatur dan Pengusaha pariwisata yang mengikuti diklat	Paket	2	2	2	2	2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pengusaha pariwisata	Pengembangan Kemitraan (2.04.XX.17)	
4.7 Meningkatkan kontribusi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah pada Perekonomian Daerah	4.7.1 Meningkatkan volume Dana Bergulir sebagai penguatan Modal Usaha	Jumlah Penerima Bantuan Dana Bergulir Prosentase Pengembalian sesuai target yang	BU %	160 100	160 100	165 100	170 100	180 100	Meningkatkan modal usaha bagi Koperasi dan PKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (1.15.XX.17)	Bidang Koperasi ,usaha kecil dan menengah (1.15)
	4.7.2 Meningkatkan pengembangan Usaha Koperasi dan PKM	Peningkatan jenis Usaha Koperasi dan PKM Peningkatan volume usaha	Jenis %	5 10	5 10	5 10	5 10	5 10	Meningkatkan jenis dan Volume Usaha	Penciptaan Iklim Usaha Usaha kecil Menengah yang Kondusif (1.15.XX.15)	
	4.7.3 Meningkatkan kualitas SDM bidang koperasi & PKM	Pelatihan terhadap SDM Bidang Koperasi dan PKM	Paket	1	1	1	1	1	Meningkatkan SDM Koperasi & PKM	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (1.15.XX.18)	

MISI 5 :

Mendayagunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
5.1 Terwujudnya kelestarian dan kemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	5.1.1 Berkurangnya lahan kritis	Penanganan Lahan Kritis	Ha	575	1150				Meningkatkan penanganan lahan kritis	Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (I.08.XX.18)	Bidang lingkungan hidup (I.08)
	5.1.2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tertanganinya sungai yang beban pencemarannya melebihi baku mutu	m	1000	1000	1000	1000	1000	Penanganan pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (I.08.XX.16)	Bidang lingkungan hidup (I.08)
		Tertanganinya pantai yang mengalami abrasi	m	1000	1000	1000	1000	1000			
		Pelestarian keanekaragaman flora dan fauna	Jenis	20	20	20	20	20			
		Pengawasan, Pengendalian dan pemantauan pelestarian SDA dan LH	Kec.	18	18	18	18	18			
		Tertanganinya kerusakan lingkungan akibat penambangan Terbangunnya talud penahan tanah longsor dan saluran air limbah di 18 Kec.	% Paket	5 3	5 3	5 3	5 3	5 3			
	5.1.3 Meningkatnya kualitas sarana prasarana sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terbitnya SK Bupati tentang jenis flora dan fauna yang dilestarikan dan Kawasan Penambangan	Set	1	1	-	-	-	Memberdayakan kemampuan Pemkab dalam mengelola SDA yang berkelanjutan	Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam (I.08.XX.17)	Bidang lingkungan hidup (I.08)
		Tersedianya data cadangan bahan galian C yang akurat	Jenis	2	2	2	2	2			
		Tersedianya Gedung, Kantor dan laboratorium, kendaraan, sarpras kantor, sarana pengolahan limbah	Paket	4	3	3	1	1			
		Tersedianya Kawasan industri pembakaran batu gamping	Paket	1	1	-	-	-			
	5.1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang Lingkungan	Jumlah Personil dengan spesifikasi khusus (laboratorium, teknik lingkungan, teknik kimia)	Org	3	3	3	-	-	Meningkatkan kualitas SDM laboratorium sesuai kebutuhan	Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam (I.08.XX.17)	Bidang lingkungan hidup (I.08)
	5.1.5 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif	Terlaksananya pilot project pemanfaatan energi surya	KK	20	-	20	-	20	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pemanfaatan Energi Alternatif (2.03.XX.17)	Bidang Energi dan sumber daya mineral
		Terlaksananya pilot project pemanfaatan energi biomasa	paket	1	1	1	1	1			

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
5.2 Terwujudnya kondisi ramah lingkungan di perkotaan	5.2.1 Meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan perkotaan	Persentase jumlah sampah yang diangkut terhadap jumlah produksi sampah	%	15	17	19	21	22	Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana serta keindahan lingkungan perkotaan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (1.08.XX.15)	Bidang Lingkungan Hidup (I.08)
		Persentase kapasitas kontainer terhadap jumlah produksi sampah	%	35	37	38	41	43			
		Persentase kapasitas TPS terhadap produksi sampah	%	65	70	75	80	85			
		Persentase peningkatan jumlah lampu Penerangan Jalan Umum	%	4	4	4	4	4			
		Persentase peningkatan trotoar dan drainase Kota terbangun	%	10	10	10	10	10			
		Persentase luas pemeliharaan taman kota terhadap total luas taman kota	%	75	75	75	75	75			
		Jumlah pemasangan jaringan listrik di pedukuhan	pdkh	14	14	14	14	14			
		Tersedianya armada penyedotan tinja	%	-	-	1	-	1			
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau di perkotaan	%	10	12	14	16	20					

MISI 6 :

Menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

TUJUAN	SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)			
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006				2007	2008	2009
6.1 Terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima	6.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase pelayanan Administrasi kependudukan yang tepat waktu dan tepat mutu kepada masyarakat	%	60	60	65	70	75	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembekalan teknis administrasi kependudukan, penderasan KTP/KK, informasi dan kependudukan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki akta	Penataan administrasi Kependudukan (1.10.XX.15)	Bidang Kependudukan dan catatan sipil (1.10)
		Persentase penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk usia KTP	%	60	60	65	65	70			
		Persentase Keluarga ber KK terhadap jumlah KK	%	60	60	62	65	70			
		Persentase penertiban Akta Lahir terhadap jumlah kelahiran	%	28	30	33	35	37			
		Persentase penertiban Akta Kematian terhadap jumlah kematian	%	1	1	1	2	2			
		Persentase penertiban akta perkawinan non muslim terhadap jumlah perkawinan non muslim	%	9	10	11	12	13			
		Persentase Laporan Kependudukan dan akta catatan sipil terbit tepat waktu dan tepat mutu	%	50	60	70	70	70			
		Beroperasinya Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) secara terpadu dari desa, kecamatan dan kabupaten	%	50	60	70	70	80			
	6.1.2 Adanya Penurunan jumlah Keluarga Miskin	Persentase penurunan jumlah Keluarga Prasejahtera Alasan ekonomi dan KS 1 Alasan Ekonomi	%	31.91	31.5	31.1	30.85	30.25	Memberikan bantuan modal dan ketrampilan kepada Keluarga Pra KS alasan ekonomi dan KS 1 Alasan ekonomi	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (1.13.XX.15)	Bidang Sosial (1.10)
	6.1.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Menurunnya Total Fertility Rate	%	2.41	2.35	2.30	2.25	2.20	Mendorong masyarakat agar selalu berkesadaran untuk berkeluarga berencana dan melakukan pembinaan terhadap keluarga pada kelompok bayi, remaja maupun usia lanjut	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan dimasyarakat (1.12.XX.15) Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (1.12.XX.16) Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (1.12.XX.17) Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (1.12.XX.18) Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (1.12.XX.19)	Bidang KB dan KS (1.12)

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
6.1.4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bina keluarga	Meningkatnya peserta	BKB	%	41.49	41.60	41.80 %	41.95 %	42.10		Keluarga berencana (1.12.XX.20) Kesehatan Reproduksi Remaja (1.12.XX.21) Pelayanan konseling KB (1.12.XX.22) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri (1.12.XX.23) Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU (1.12.XX.24)	Bidang KB dan KS (1.12)
		BKR	%	%	%	39.95 %	40.05 %	%			
		BKL	%	39.71	39.85	46.50 %	46.70 %	40.15			
6.1.5 Adanya peningkatan pemberangkatan calon transmigrasi	Jumlah transmigran diberangkatkan	KK	30	35	40	45	50	Pelatihan ketrampilan penduduk rentan dan transmigrasi	Peningkatan jumlah Transmigran yang diberangkatkan (2.08.XX.16)	Bidang transmigrasi (0.28)	
6.1.6 Peningkatan penanganan penduduk rentan	Persentase peserta latihan mendapatkan pekerjaan terhadap total peserta latihan	%	40	42	45	47	50		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang tenaga kerja (1.14)	
6.2 Adanya peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan yang mampu menurunkan tingkat pengangguran	6.2.1 Adanya peningkatan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri	Jumlah pelatihan Tenaga Kerja melalui BLK, Magang Kerja Siswa, Dinas Perindag dan Magang kerja Pencari Kerja	Orang	950-160	990-1200	1030-1240	1070-1280	1110-1320	Pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja (1.14.XX.15)	Bidang tenaga kerja (1.14)
		Jumlah penempatan tenaga kerja dari									
		- Tenaga kerja terlatih	%	100	100	100	100	100			
		- Pencari kerja	%	1-3	2-4	3-5	4-6	4-6			
		Jumlah penyelesaian kasus TKI	%	100	100	100	100	100			
		Jumlah pemberian ijin operasional									
		Lembaga latihan swasta	%	100	100	100	100	100			
		Bursa kerja khusus	%	100	100	100	100	100			
Jumlah pemberian rekomendasi ijin TKA	%	100	100	100	100	100					
6.2.2 Meningkatnya perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengusaha	Jumlah penyuluhan hubungan industri	Kasus ketenagakerjaan di perusahaan	%	100	100	100	100	100	Perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengusaha	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (1.14.XX.17)	Bidang tenaga kerja (1.14)
		Penyuluhan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan	Kal	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10			

		Pemeriksaan ketaatan terhadap perundang – undangan ketenagakerjaan	Kal	72-96	84-96	96-108	108-120	120-144			
		Jumlah pemeriksaan dan pengujian K3	Kal	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6			
		Jumlah penyuluhan / sosialisasi UMK	Kal	6	6	6	6	6			
	6.3.3 Tersedianya jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan ekonomi daerah	Jumlah Pembangunan jalan dan jembatan sesuai standar kualitas yang berlaku	Paket	2	2	2	2	2	Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan (1.03.XX.18)	Bidang pekerjaan umum (1.03)
		Jumlah Peningkatan jalan, jalan desa, peningkatan jembatan dan penggantian jembatan	Paket	4	4	4	4	4		Peningkatan jalan dan jembatan	
		Jumlah Perbaikan Jembatan	Paket	5	4	4	4	5		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (1.03.XX.18)	
		Jumlah Pemeliharaan jalan Berkala	Paket	1	1	1	1	1			
		Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Paket	1	1	1	1	1			
		Pengadaan Alat Pemeliharaan jalan dan jembatan	Paket	1	2	2	2	2			
		Jumlah Bantuan aspal disalurkan dan digunakan	Drum	6000	5000	4000	4000	4000		Tanggap darurat jalan dan jembatan (1.03.XX.21)	
		Peningkatan Kapasitas Tonase Jalan Raya	%	15	15	20	25	25		Inspeksi kondisi jalan dan jembatan (1.03.XX.20)	
	6.3.4 Meningkatnya areal sawah yang dapat diairi dengan dukungan sarana pengairan yang memadai	Peningkatan luas areal sawah yang terairi	Ha	79.4 Ha	79.4 Ha	-	-	-	Meningkatkan pengelolaan Sumber daya Air	Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. (1.03.XX.24)	Bidang pekerjaan umum (1.03)
		Jumlah panjang sungai dan dinormalisasi	Paket	1	1	1	1	1			
		Penelitian potensi sungai dan kalibrasi alat ukur debit	Paket	1	1	1	1	1			
		Jumlah pengaman sungai dibangun dan pemeliharaan drainase	Paket	2	2	2	2	2			
		Jumlah operasional dan pemeliharaan bendung, bangunan dan saluran	Paket	3	3	3	3	3			
		Jumlah talud pengaman sungai dibangun	Paket	1	1	1	1	1			
		Jumlah pemeliharaan bendung, saluran irigasi dan bangunan air	Paket	3	3	3	3	3			
		Jumlah pembangunan bendung, saluran irigasi dan bangunan air	Paket	3	3	3	3	3			
	6.3.5 Meningkatnya kinerja Pekerjaan Umum	Persentase hasil kerja sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Meningkatkan kinerja Pekerjaan Umum	Pembangunan sistem informasi /data base jalan dan jembatan (1.03.XX.22)	
		Persentase Pemetaan Jaringan jalan	%	20	40	60	80	100			
		Persentase pembuatan Drainase Jalan Kabupaten	%	20	40	60	80	100			
		Persentase klasifikasi jalan Kabupaten	%	20	40	60	80	100			
		Persentase Detail Engineering Detail Sungai	%	20	40	60	80	100			
		Persentase Pemetaan ABT	%	20	40	60	80	100			
		Persentase jalan berleger terhadap total jalan yang seharusnya berleger	%	20	40	60	80	100			

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
6.4 Terwujudnya peningkatan kualitas perhubungan	6.4.1 Meningkatnya tertib dan kelayakan kendaraan umum	Penurunan jumlah kecelakaan	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	Menurunnya jumlah kecelakaan dan meningkatnya laju Kendaraan	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas (1.07.XX.19)	Bidang perhubungan (1.70)
		Peningkatan laju kendaraan	%	5	5	5	5	5			
	6.4.2 Meningkatnya kelayakan kendaraan umum	Persentase kendaraan umum yang melaksanakan uji kelayakan terhadap total kendaraan umum	%	90	90	90	90	90	Meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (1.07.XX.20)	
		Tersedianya sarana prasarana pengujian kelayakan kendaraan berbasis komputer	%	100	100	100	100	100			
	6.4.3 Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum	Persentase pengusaha kendaraan umum memiliki ijin trayek terhadap total pengusaha kendaraan umum	%	100	100	100	100	100	Meningkatkan jumlah angkutan umum	Peningkatan pelayanan angkutan (1.07.XX.17)	
		Persentase penurunan jumlah penyimpangan taryek	%	5	5	5	5	5			
		Persentase kendaraan angkutan umum yang beroperasi terhadap angkutan umum yang memiliki	%	98	98	98	98	98			
	6.4.4 Tersedianya sarana keselamatan yang memadai	Persentase realisasi rambu, trafict light, patok pengaman, marka dan guard drial terpasang terhadap jumlah sarana kelestarian direncanakan	%	70	80	90	100	100	Meningkatkan jumlah sarana jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (1.07.XX.16)	
	6.4.5 Meningkatnya kenyamanan, kecukupan, ketertiban dan keamanan sarana perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pake t	1	1	1	1	1	Meningkatkan jumlah sarana prasarana perhubungan angkutan dan menurunkan tingkat pelanggaran	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (1.07.XX.18)	
		Jumlah angkutan umum memadai	%	20	20	20	20	20			
Penurunan terjadinya pelanggaran lalu lintas		%	5	5	5	5	5				
6.4.6 Meningkatnya kualitas Rencana Umum, Jaringan Transportasi Kabupaten	Tersusunnya RUUT Kabupaten	%	-	100	-	-	-	Meningkatkan RUUT Kabupaten	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (1.07.XX.15)		
6.4.7 Tersedianya Database Management bidang Perhubungan	Beroperasinya Database Management bidang Perhubungan	%	60	100	100	100	100	Menyusun DBMS bidang Perhubungan	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (1.07.XX.15)		
6.5 Terwujudnya pelayanan pasar yang efektif	6.5.1 Meningkatnya tingkat hunian, kenyamanan, kecukupan, kebersihan, ketertiban dan keamanan sarana prasarana pasar pada 26 pasar	Persentase jumlah kios dan los terhadap total jumlah pedagang	%	60	70	80	90	100	Mengembangkan tingkat hunian, rasa nyaman kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar secara bertahap	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.XX.18)	Bidang perdagangan (2.06)
		Persentase jumlah kios/ los terhadap total jumlah kios/los	%	70	75	80	90	100		Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan (2.06.XX.19)	
		Persentase peningkatan PAD Sektor Pasar	%	5	5	5	5	5			
		Jumlah peningkatan kelas pasar	Unit			1	1				

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
6.6 Terselenggaranya Manajemen Perencanaan dan Pembangunan yang berkualitas	6.6.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang kredibel dan efektif	Tersusunnya Dokumen Perencanaan 5 Tahunan	Pake t	-	-	-	-	2	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang kredibel dan efektif yang berbasis kinerja	Perencanaan Pembangunan Daerah (1.06.XX.21)	Bidang perencanaan pembangunan (1.06)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan tahunan (AKU, SP dan RAPBD)	Pake t	3	3	3	3	3			
		Studi dan Kajian penunjang Dokumen Perencanaan	Pake t	15	12	13	11	11			
		Program Pengembangan Ekonomi	Pake t	3	3	3	3	3			
		Tersusunnya Dokumen Perstatistikan	Pake t	5	5	5	5	5			
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Pake t	7	7	7	7	7			
		Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan	Pake t	7	7	7	7	7			
		Terpenuhinya sarana prasarana perencanaan	Pake t	10	9	7	5	5			
		Peningkatan kualitas SDM	Pake t	3	3	3	3	3			
6.6.2 Terwujudnya pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih dan profesional	6.6.2 Terwujudnya pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih dan profesional	Persentase realisasi pemeriksaan sesuai PKPT	%	100	100	100	100	100	Pengendalian pembangunan, peningkatan fungsi pengawasan yang mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Pembinaan dan Pengembangan aparatur (1.21.XX.17)	Bidang kepegawaian (1.21)
		Persentase realisasi pemeriksaan khusus/kasus yang layak diperiksa	%	100	100	100	100	100			
		Persentase tersusunnya tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan	%	100	100	100	100	100			
6.6.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	6.6.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase tersusunnya APBD sesuai ketentuan yang berlaku	%	90	100	100	100	100	Menyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (1.20.XX.17)	Bidang pemerintahan umum (1.20)
		Persentase penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	%	90	100	100	100	100			
		Persentase tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah setiap tahunnya yang tepat waktu dan tepat mutu	%	90	100	100	100	100			
		Persentase tersusunnya Perhitungan APBD yang tepat waktu dan tepat mutu	%	90	100	100	100	100			
6.6.4 Adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah	6.6.4 Adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah	Prosentase penerbitan/pendistribusian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah terdapat jumlah WP/WR	%	100	100	100	100	100	Megoptimalkan pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan sumber-sumber penerimaan yang tidak merugikan masyarakat	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (1.20.XX.17)	
		Persentase Surat Tagihan diterima Wajib Pajak/Retribusi tepat waktu terhadap WP yang menunggak	%	100	100	100	100	100			
		Peningkatan Pendapata Asli Daerah sendiri	%	10	10	10	10	10			
		Lain-lain pendapatan yang sah	%	10	10	10	10	10			
		Persentase PADS terhadap total APBD	%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5			
		Persentase peningkatan Bagian Laba BUMD dan Perusda	%	15	15	15	15	15			

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
	6.6.5 Tersedianya produk hukum yang mendorong penurunan tingkat pelanggaran hukum	Persentase realisasi Rapenda diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap total pengajuan Rapenda	%	100	100	100	100	100	Menyusun produk hukum daerah yang berpedoman pada peraturan yang ada dan harus memperhatikan kepada aspek budaya, keanekaragaman, kebutuhan dan aspirasi di masyarakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (1.20.XX.15)	
Tersedianya Sistem Informasi Produk Hukum Daerah berbasis Komputer		%	25	50	75	100	100	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (1.20.XX.23) 2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (1.20.XX.24) 3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (1.20.XX.26) 4. Penataan Daerah Otonomi baru (1.20.XX.27) 5. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (1.20.XX.16)			
Persentase penyelesaian kasus hukum		%	100	100	100	100	100				

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
	6.6.6 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya aparatur pemerintah sesuai standar nasional	Persentase PNS yang dikirim mengikuti DIKLAT PIM terhadap total Pejabat yang belum mengikuti DIKLAT PIM	%	100	100	100	100	100	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan menanamkan adanya budaya kerja dan disiplin kerja	Pendidikan kedinasan (1.21.XX.15)	Bidang kepegawaian (1.21)
		Persentase PNS yang dikirim mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional terhadap total penawaran atau kebutuhan	%	70	75	80	85	90			
		Persentase PNS yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar terhadap total kebutuhan	%	100	100	100	100	100			
		Terselenggaranya Diklat Teknis Fungsional	jenis	3	4	5	6	7			
	6.6.7 Menigkatnya kualitas asministrasi pemerintah yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran	Persentase penerbitan SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Pensiun Pegawai yang tepat waktu sesuai Standar Operasional (SOP)	%	100	100	100	100	100	Mengusahakan peningkatan kualitas sistim dan pelaksanaan administrasi pemerintahan melalui pembangunan sistim yang memadai dan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (1.21.XX.16)	Bidang komunikasi dan informatika (1.25)
		Beroperasinya Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis komputer	%	60	80	100	100	100			
		Adanya administrasi aset daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku, akurat dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100			
		Persentase jumlah Aset Daerah dapat beroperasi terhadap total jumlah aset daerah	%	90	90	90	90	90		Pembinaan dan pengembangan aparatur (1.21.XX.17)	
	6.6.8 Terwujudnya pemerataan informasi dan komunikasi bagi suksesnya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Pers Realease diterbitkan terhadap total pembuatan Pers Realease	%	80	80	90	90	100	Memeratakan informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengoptimalkan sarana yang dimiliki	1. Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa (1.25.XX.15) 2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (1.25.XX.16)	Bidang komunikasi dan informatika (1.25)
		Persentase pelaksanaan protokoler sesuai standar protokoler	%	100	100	100	100	100			
		Pengembangan Telematika	%	50	60	70	80	100			
		Terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100			
Jumlah penerbitan majalah PERTIWI		eks	4800	4800	4800	4800	4800	1. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi (1.25.XX.17) 2. Kerjasama Informasi dengan mas media (1.25.XX.18)			
6.6.9 Adanya peningkatan pelayanan data dan sistem informasi serta kearsipan yang sepat, tepat dan akurat	Tersedianya Master Plan Rencana induk Komputerisasi E-Government SIMDA	%	100	-	-	-	-	Meningkatkan pelayanan penyiapan data, sistem informasi dan kearsipan yang cepat, tepat dan akurat	Pengembangan data/informasi /statistik daerah (1.23.XX.15)	Bidang statistik (1.23)	
	Persentase pembangunan RIK-SIMDA	%	30	70	80	90	100				
	Persentase jumlah rekomendasi di bidang Telematika terhadap jumlah permohonan unit kerja	%	100	100	100	100	100		1. Perbaikan sistem adm. Kearsipan (1.24.XX.15) 2. Penyelamatan / pelestarian dokumen/arsip daerah (1.24.XX.16) 3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana / prasarana kearsipan (1.24.XX.17) 4. Peningkatan kualitas layanan informasi (1.24.XX.18)		
	Persentase ketertiban pengArsipan per Unit Kerja	%	10	20	50	75	100				

TUJUAN	SASARAN								KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
	URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET							
				2005	2006	2007	2008	2009			
	6.6.10 Adanya peningkatan kinerja Perusda dan pembangunan daerah, tingkat Investasi Daerah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Tingkat kinerja Perusda	%	60	70	80	90	100	Mengupayakan peningkatan kinerja Perusda dan pembangunan Daerah, tingkat investasi daerah dan	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi (1.16.XX.15)	Bidang penanaman modal (1.16)
		Peningkatan Jumlah investasi daerah	%	10	10	10	10	10		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (.16.XX.16)	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	%	15	17	20	25	30		Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah (1.16.XX.17)	
	6.6.11 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan yang sesuai standar	%	80	80	90	95	100	Mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar muncul dorongan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Pelayanan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan / Desa yang cepat dan tepat (1.20.XX.20)	Bidang pemerintahan umum (1.20)
		Persentase Kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kelurahan dan Desa yang sesuai standar	%	80	80	90	95	100		Penyusunan LPJ	
		Persentase penyusunan LPJ Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	90	95	100	100			
	6.6.12 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah	Tersusunnya Perda SOT dan SK Bupati tentang Uraian Tugas	%	60	80	100	100	100	Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah sehingga mempercepat terwujudnya visi daerah	Penataan Daerah Otonomi baru (1.20.XX.27)	
		Persentase realisasi penerapan peraturan tentang ketatalaksanaan	%	60	80	100	100	100			
		Tersusunnya Pedoman Analisa Jabatan	%	20	40	60	100	100			
	6.6.13 Terwujudnya pelayanan prima terhadap legislatif	Tersusunnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satwan	%	100	100	100	100	100	Mempercepat tersusunnya Standar Operasional dan Prosedur pada Sekreaiat Dewan untuk mewujudkan pelayanan yang prima terhadap proses kerja legislatif	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (1.20.XX.15)	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana Satwan sesuai dengan SOP yang berlaku	%	0	100	100	100	100			
		Persentase penyelenggaraan sidang dewan sesuai dengan SOP yang berlaku	%	0	100	100	100	100			
6.6.14 Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat	Terlaksananya mediasi dan fasilitasi di bidang :							Meningkatkan mediasi dan fasilitas kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, pengkajian masalah aktual dan perlindungan masyarakat	Pengembangan wawasan kebangsaan (1.19.XX.17)	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (1.19)	
	- Kesatuan Bangsa	%	100	100	100	100	100				
	- Hubungan antar lembaga	%	100	100	100	100	100				
	- Pengkajian masalah aktual	%	100	100	100	100	100				
	- Perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100				

BUPATI TEGAL

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO